

Jurnal Pendidikan dan Pemikiran

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

Halaman UTAMA: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

EKSISTENSI MADRASAH DALAM PERSPEKTIF SEJARAH PENDIDIKAN DI INDONESIA

MARIATUL HIKMAH

umi.mariatulhikmah@gmail.com

Abstrak

Muhaimin dan Abdul Majid lebih menitikberatkan kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan islam setidaknya-ditidaknya dilatarbelakangi oleh empat factor sebagai berikut: 1) Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan islam. 2) Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren terhadap suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. 3) Adanya sikap mental dengan sementara golongan umat islam, khususnya santri yang terpukau dengan barat dengan sistem pendidikan mereka. 4) Sebagai usaha untuk menjembatani antara sistem pendidikan nasional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dengan hasil akulturasi

PENDAHULUAN

Awal islam masuk kei Indonesia yakni sekitar abad ke 7 masehi, pada masa itu lembaga pendidikan islam belumlah secara resmi disebut madrasah. Keberadaan sebuah madrasah di Indonesia merupakan darisebuah keberlanjutan dari pendidikan yang ada di Masjid.

Menurut para pakar sarjana yang ada di masa itu bahwa masjid bukanlah tempat yang sesuai untuk melaksanakan pembelajaran, karena pada dasarnya masjid bukanlah sebuah lembaga formal tetapi tempat masyarakat melaksanakan ijazah . adanya kausalitas dengan hal itu, maka muncul ide dari para cendikiawan muslim tepatnya para sarjana yang ada di kala itu untuk membuat madrasah oleh masyarakat. Madrasah sendiri erupakan sebuah cikal bakal yang lahir dari pesantren.

PEMBAHASAN

1. Sejarah Berdirinya Madrasah.

Madrasah merupakan perkembangan dari sebuah pesantren yang sebelumnya sudah menjamur di Indonesia.¹ Sebelum dikatakan sebagai lembaga pendidikan islam resmi dikatakan madrasah maka bermacam-macam nama yang ada, di Sumatra barat lembaga pendidikan islam untuk masjid disebut surau, , di Sumatra selatan

¹ Nanang Fathur Rohman, *Madrasah Sekolah Islam terpadu plus dan unggulan*, (Lentera hati, Depok, 2011), hlm 18.

disebut Langgar, di Aceh disebut Dayyah atau Madrasah, di Gayo disebut Merasah.² Di Sumatra selatan dan Kalimantan disebut Pesantren.

Madrasah dikatakan sebagai sekolah umum yang berciri khas agama islam. Madrasah berdiri dalam sejarahnya karena adanya upaya pembaharuan, dikarenakan adanya sistem pendidikan islam tradisional dalam bentuk pesantren, dakwah dan majelis taklim dalam pembaharuannya. Dikarenakan sistem pendidikan islam dalam bentuk pesantren, dakwah, dan majelis taklim oleh para sarjana muslim yang ada kala itu kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Para sarjana yang ada di masa itu juga merasa risau terkait perkembangan sekolah-sekolah Belanda yang semakin banyak, dan adanya sekolah Belanda ini akan menumbuhkan bibit sekolarisme di masyarakat.

Dalam kategori lembaga pendidikan islam, maka madrasah adalah pengembangan dari pesantren. Di masa itu, dikalangan umat islam, maka masalah yang berkaitan dengan umat islam mendapatkan perhatian yang khusus. Perkembangan politik di Indonesia yang tidak menentu, namun tetap saja dunia pendidikan tetap terbuka. Hal ini bisa kita analisis dari antusiasme dari masyarakat terhadap pentingnya nilai pendidikan yang sangat mendorong munculnya lembaga pendidikan islam untuk mendapatkan masa depan yang baik bagi umat muslim.

Perkembangan sebuah madrasah tentu sangat berpengaruh dengan keadaan politik. Di masa H. Mukti Ali ingin mendobrak pemikiran masyarakat yang bermakna sumbang terkait madrasah. Madrasah yang didudukkan pada posisi yang marginal dikarenakan hanya terfokus pada masalah agama dan tidak memiliki pengetahuan umum. Dengan adanya SKB 3 Menteri, ternyata masyarakat mulai memahami eksistensi masyarakat dalam konteks pendidikan secara nasional.

2. Madrasah Dan Kurikulum

Pada masa Pasca kemerdekaan, maka Stanbrink melaporkan dalam rangka konvergensi Departemen agama di masa ini menggantikan di pesantren tradisional untuk mengembangkan diri menjadi madrasah. Di susun secara klasikal dengan memakai kurikulum yang tetap dengan cara memasukkan pelajaran umum di samping agama, sehingga murid di madrasah mendapatkan pelajaran yang sama dengan murid sekolah umum. Pada masa itu, banyak dari pesantren memasukkan kurikulum ke dalam pelajarannya yang mencakup materi membaca, menulis, Bahasa Indonesia, Ilmu Bumi serta belajar berhitung. Dari hal yang sudah dijelaskan ini, maka dapat dianalisis bahwasanya madrasah itu tumbuh dan berkembang secara alamiah dan murni dari sebuah keinginan masyarakat, khususnya masyarakat islam.

Orde lama memberikaan kebijakan yang luas kepada madrasah sebagai usaha untuk menumbuh dan mengembangkan serta mmeberi ruang kepada pendidikan islam. Kehadiran Madrasah di Indonesia sebelum pasca kemerdekaan dikarenakan ketidakpuasan dengan sistem pesantren yang hanya menitik beratkan pada agama. Kemudian Departemen Agama dibentuk.³ Dalam rangka memperkuat eksistensi

² Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hilda Karya Agung, 1996, hlm 33.

³ Beberapa bulan setelah kemerdekaan Indonesia, Pada tanggal 3 Januari 1946, maka pemerintah membentuk Departemen Agama yang berfungsi untuk mengurus penyelenggaraan.

madrasah sebagai komponen pendidikan nasional, artinya diakui sebagai penyelenggara kewajiban belajar sebagaimana tercantum dalam UU pokok.

Adanya madrasah diinginkan untuk memberlakukan secara berimbang antara ilmu agama dan pengetahuan umum. Pada masa itu madrasah merupakan perpaduan antara sistem pendidikan pesantren dengan sistem pendidikan colonial.

Muhaimin dan Abdul Majid lebih menitikberatkan kehadiran madrasah sebagai lembaga pendidikan islam setidaknya-didaknya dilatarbelakangi oleh empat factor sebagai berikut: 1) Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan islam. 2) Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren terhadap suatu sistem pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum. Misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah. 3) Adanya sikap mental dengan sementara golongan umat islam, khususnya santri yang terpukau dengan barat dengan sistem pendidikan mereka. 4) Sebagai usaha untuk menjembatani antara sistem pendidikan nasional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dengan hasil akulturasi.⁴

3. Potret Awal Kebijakan Pemerintah Dalam Pendirian Sekolah Islam

Misi kristenisasi dari pemerintah colonial Belanda yang mengeluarkan kebijakan ordonasi guru.⁵ Kebijakan yang ada dalam ordonasi guru ini sangat menekan bagi umat islam yang mana meminta setiap dari guru agama untuk melaporkan terlebih dahulu terkait izin mengajar, dalam ordonasi yang ke dua nilai agak ringan yang hanya mewajibkan guru agama untuk melaporkan diri yang mana digunakan oleh Belanda sebagai sekap terjang sebagai media pengontrol. Yang mana dengan adanya kebijakan ini justru sangat membangkitkan semangat para tokoh islam untuk mendirikan Sekolah Islam swasta.

Kebijakan politik pemerintah pada masa penjajahan secara umum merupakan suatu instrument politik yang digunakan untuk memasukkan dan melestarikan kolonialisme. Pendidikan bagi orang-orang pribumi di masa itu untuk melestarikan pendidikan islam tidaklah menjadi masalah yang besar, dikarenakan kelanjutan dari sistem berupa langgar, pesantren dan madrasah terus berjalan.

Kesempatan mendapatkan pendidikan hanya diberikan kepada para anak bangsawan saja, sehingga dikemudian hari para anak-anak bangsawan ini dapat menjadi pemimpin yang ke barat-baratan dan kaum elit yang terpisah dari bangsanya sendiri. Hal ini sangat dirasakan oleh kaum jelata bahwa dengan memiliki pendidikanlah maka status sosial dapat diperbaiki, sehingga bermunculanlah berbagai perguruan swasta.

⁴ Muhaimin dan Abdul Mujib dalam Samsul Nizar, *Sejarah sosial dan dinamika intelektual*, (Jakarta:Kencana:2013), hlm 262.

⁵ Zuhairini, *Sejarah pendidikan islam*, Jakarta, Bumi aksara, 2000, hlm 62.

Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia membuat bahagia bangsa Indonesia karena merupakan angin segar bagi bangsa Indonesia dengan harapan dapat mengusir Belanda yang datang mengganggu Bangsa Indonesia. Adapun kebijakan pertama yang dilakukan oleh Bangsa Jepang adalah dengan mengambil alih kekuasaan Belanda dan menjalin kerja sama dengan golongan Islam. Tujuan ini memang sengaja dibuat untuk mengumpulkan masa supaya bersimpat dengan bangsa Jepang. Kemudian Jepang juga menciptakan *Shumubu* yakni kantor urusan agama di Ibu Kota untuk mengorganisasikan umat Islam. Maret tahun 1942 ditunjuk KH. Hasyim ashari sebagai kepala kantor ini. Dan mulai pula di buka cabang-cabang *Shumubu* di setiap keresidenan.

Terbentuknya Departemen agama pada tanggal 3 Januari di tahun 1945. Adapun maklumat Departemen agama no 2 tanggal 23 April 1946 menetapkan bahwa 1) *Shumuka* yang dalam zaman Jepang termasuk dalam kekuasaan residen menjadi jawatan agama daerah yang selanjutnya ditempatkan di bawah departemen agama, 2) Hak untuk mengangkat ketua pengadilan agama, ketua dan anggota agama yang dahulunya ada di tangan residen, maka selanjutnya diserahkan kepada kementerian agama. 3) Hak untuk mengangkat penghulu masjid yang dahulu ada di tangan Bupati, maka untuk seterusnya diserahkan kepada kementerian agama. Berdirinya departemen agama untuk pertama kalinya terdapat di Jogjakarta. Adapun perkembangan madrasah masa orde lama, sejak masa kemerdekaan sangatlah terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi pada tanggal 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Adapun usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, ada satu bagian khusus di kementerian agama kala itu yang mengurus masalah pendidikan Islam.

4. Pembaharuan Kurikulum di Madrasah

Ketika Bangsa Indonesia merdeka, maka pintu untuk membangun Negara melalui jalur pendidikan terbuka lebar, sebagaimana yang tertera dari Undang-undang bahwa bangsa Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Di masa orde lama di bawah kepemimpinan Soekarno, fokus pembangunan nasional banyak tertumpu pada bidang politik, karena di masa itu terjadi transisi politik dari masa penjajahan menuju Indonesia merdeka. Departemen agama sebagai lembaga pada saat itu sangat intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Ikatan kurikulum yang ada di madrasah kala itu belumlah begitu kuat secara nasional. Isi dari sebuah kurikulum kala itu masih bersifat kebijakan seperti madrasah aliyah Muhammadiyah Muallimin dan Pesantren Gontor yang memiliki porsi yang berbeda terkait isi kurikulumnya.

Sebelum tahun 1973, kurikulum madrasah belumlah muncu secara nasional. Kurikulum yang ada di madrasah masih ditentukan oleh lembaga masing-masing sehingga terjadi perbedaan satu sama lainnya. Nama dari kurikulum belum dikenal, masih menggunakan rencana pengajaran. Di masa ini kurikulum sebenarnya sudah

mulai berkembang dengan baik yang ditandainya dilegalkan kurikulum yang ada di madrasah untuk diimplementasikan kepada siswa dalam proses pembelajaran.

Dalam analisisnya antara kurikulum yang satu dengan kurikulum yang lainnya terkait dengan kebijakan walaupun kurikulum di masa itu sudah menunjukkan progress. Kebijakan kurikulum masa itu masih ditentukan oleh lembaga masing-masing. 1) Rencana pelajaran muallimin muhammadiyah di bagi menjadi dua yaitu agama dan umum, adapun materi agama yang terkandung di dalamnya hadis, fiqih, tarikh. Dan untuk rencana pengajaran umum terdiri dari bahasa arab, bahasa Indonesia, bahasa ingris, ilmu pasti, ilmu alam , pengetahuan dagang, ilmu hayat, sejarah Indonesia dan umum, tata Negara, menulis latin, menggambar, ekonomi, filsafat agama, kemuhammadian dan kepanduan.⁶ Antara mata pelajaran umum dan agama punya porsi yang sama. 2) Untuk madrasah gontor, maka mata pelajarannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu bahasa arab, ilmu agama, dan ilmu umum. Untuk kelompok bahasa arab mata pelajarannya meliputi imlak, mwngarang pidato, pidato, khat, nahu, syaraf, balaghoh. Kelompok ilmu agama terkait dengan tafsir, ushul fiqih, aqoid, mantik, tarekh islam,. Dan untuk ilmu umum, maka mata pelajarannya terkait dengan ilmu hitung, al-Jabar., ilmu ukur, ilmu hayat, sejarah Indonesia, ilmu bumi, pendidikan, praktek mengajar, gerak badan, seni suara, Bahasa Indonesia. Pelajaran agama lebih banyak alokasi waktunya dari mata pelajaran umum.

Di Sumatra Barat ada Adabiyah School. Dengan menggunakan materi agama sebagai materi pokok di awal berdirinya. Di Adabiyah adanya integrasi antara ilmu umum dengan ilmu agama. Metode mengajar yang digunakan tidak hanya menggunakan metode ceramah namun digunakan juga metode diskusi yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berdialog secara terbuka.

Kemudian di Minang Kabau juga ada lembaga pendiidkan yang lebih penting dan lebih berpengaruh adalah madrasah thawalib, yang memiliki pengaruh besar hingga bermunculan lembaga-lembaga pendidika islam yang lainnya di Sumatra barat. Pendirinya mencoba mentransfer ide-ide modern yang positif bagi kemajuan umat islam. Madrasah Thawalip dikenal sebagai lembaga pendidikan Islam yang modern dengan menggunakan pemakaian kitab klasik dan mengembangkan intelektual dengan semangat jihad yang selalu membuka diri untuk menerima pemikiran baru yang sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk mata pelajarannya di masa orde lama masih menggunakan 100 % pelajaran agama. Di masa orde lama untuk mata pelajarannya sudah ada yang mengarah pada mata pelajaran umum seperti matematika, geografi, sejarah dan bahasa asing.

Jika kita melihat perbandingan persentase pelajaran agama dan umum di masa kurikulum tahun 1958, di mana masih ada kurikulum di madrasah yang masih bersifat nasional, maka dapat dilihat pelajaran agamanya masih bersifat nasional, maka dapat dilihat pelajaran agamanya lebih dominan. Dengan demikian persentase

⁶ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Hida karya Agung, 1996), hlm 273-274.

mata pelajaran agama dan umum pada madrasah sebelum tahun 1973 adalah beragam, yakni belum ada keseragaman kurikulum secara nasional dan lebih cenderung didominasi dengan mata pelajaran agama sebagai lembaga *Tafaqquh fi al din*.

Di masa orde baru, tepatnya setelah Soeharto mengukuhkan kekuasaannya maka masa pemerintahannya tidak banyak memberikan tempat pada partai dan pada politisi yang memiliki kedudukan tempat di masa Soekarno. Kebijakan pemerintah masa orde baru mengenai konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktual. Kebijakan madrasah di masa ini bersifat melanjutkan. Pada tahap awal madrasah juga belum dikatakan masuk dalam sistem pendidikan nasional, tetapi baru bersifat sebagai lembaga yang otonom di bawah pengawasan menteri agama.

Di tahun 1975, maka diterbitkan SKB 3 menteri yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Adapun SKB 3 menteri ini dikeluarkan pada 24 Maret 1975. SKB 3 menteri ini adalah upaya yang dilakukan untuk mengejar kembali ketertinggalan pendidikan Islam yang akan memasuki pendidikan nasional. Dengan adanya kebijakan ini, akan menjadikan sebuah madrasah setara dan sederajat dengan sekolah umum lainnya. Saat orde baru ini, kurikulum mengalami beberapa kali pembaharuan, yakni kurikulum tahun 1968, kurikulum 1975 yang disempurnakan dengan kurikulum tahun 1976 dan 1977, kemudian pembaharuan kurikulum yang terjadi pada tahun 1984, dan perubahan keempat terjadi ketika Negara kita memberlakukan Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional pada tahun 1989 beserta seperangkat peraturan pemerintah yang mengatur lebih lanjut pelaksanaan UUSPN tersebut, menyebabkan perlunya pembuatan dan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan rumusan pasal-pasal yang tercantum dalam UUSPN dan peraturan pemerintah. Dan di tahun 1994 di Negara kita diberlakukan kurikulum baru sesuai dengan keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993.⁷

PENUTUP

Madrasah merupakan Sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Cikal bakal berdirinya madrasah ini adalah dari pesantren yang memang di mulai sebelum masa kemerdekaan. Kegelisahan yang muncul dari para sarjana akan adanya masuk nilai-nilai kolonialisme di dalam sebuah Negara menimbulkan semangat yang begitu tinggi bagi para sarjana, para ilmuwan muslim untuk mendirikan pesantren, dengan adanya pesantren yang banyak di Indonesia perlu membuat sebuah pembaharuan untuk sebuah kemajuan di Negara Indonesia selain pendidikan agama juga dibutuhkan keilmuan umum untuk menangkal serangan-serangan colonial yang ada. Di awal masa orde lama berdirinya sebuah madrasah belum begitu kokoh, apalagi dengan masuknya pemikiran-pemikiran Belanda dan Jepang dalam satu tatanan pendidikan. Kurikulum yang ada di masa orde lama masih belum di kenal baru hanya sebatas pada rencana pengajaran. Di tahun 1968

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Indonesia dari zaman ke zaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm 36.

orang-orang dan sekumpulan masyarakat pendidikan sudah mengenal kata kurikulum dan pendirian sebuah madrasah sudah mendapat tempat di masyarakat. Banyak sekali muncul madrasah-madrasah swasta yang berdiri di bawah tokoh pendidikan Islam dan tokoh-tokoh organisasi keislaman yang terkenal di masa itu. Ketika orde baru utus berjalan tepatnya pada masa pemerintahan Soeharto konsep pendidikan Islam yang ada di Madrasah tinggal melanjutkan dari masa orde lama. Kemudian muncul SKB 3 menteri yang bertujuan untuk meningkatkan mutu madrasah dan keseragaman antara sekolah umum dengan sekolah agama. Dan madrasah dari tahun ke tahun semakin menunjukkan kemajuan potensinya baik dari sisi materi, metode mengajar, model dan pendekatan serta sistem organisasi yang menghilangkan asumsi masyarakat ke arah marginalisasi sebuah pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan dan kebudayaan RI, *pendidikan di Indonesia dari zaman ke zaman*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- Mahmud Yunus, *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta, Hilda Karya Agung, 1996.
- Muhaimin dan Abdul Mujib, *Sejarah sosial dan dinamika intelektual*, Jakarta, Kencana, 2013.
- Nanang Fathur Rohman, *Madrasah sekolah Islam terpaduplus dan unggulan*, Lentera hati, Depok, 2011.
- Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam, Pendekatan historis teoritis dan praktis*, Ciputat Prss, Jakarta, 2002.
- Samsul Nizar, *Sejarah sosial dan dinamika intelektual*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang No 20 tentang sistem pendidikan Nasional.
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 2000.